

Gubsu Bobby akan Bangun SMK Unggulan Pariwisata Berkonsep Boarding School di Samosir

Jakarta, MIMBAR – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan berfokus pada bidang pariwisata di Kabupaten Samosir. Sekolah berkonsep ‘boarding school’ tersebut dirancang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI)

■ Bersambung ke Hal 11



Pengungsi Papua Ditaksir Capai 122 Ribu Orang

Jakarta, MIMBAR - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyebut jumlah pengungsi di Papua diperkirakan mencapai 122 ribu orang.

Wakil Menteri HAM Mugi-yanto mengatakan angka tersebut merupakan data awal yang diterima pihaknya dan akan di-

■ Bersambung ke Hal 11



Kasus Ijazah Jokowi

Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Roy Suryo Tidak Sah

Jakarta, MIMBAR - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan KMRT Roy Suryo Notodiprojo oleh Polda Metro Jaya adalah tidak sah. Hakim berpendapat tindakan upaya paksa tersebut cacat formil.

"Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian," ujar hakim saat membacakan amar putusan perkara nomor: 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.

■ Bersambung ke Hal 11

Kasus Korupsi Bupati Kuansing KPK Sita Barang Bukti

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) periode 2021-2026 pada 4-6 Juli 2026.

Kegiatan penggeledahan dilakukan di dua wilayah, yaitu Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru. Lokasi penggeledahan di Kuansing yaitu di Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor Dinas Perkebun-

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal

Salat

22 MUHARRAM 1448 H

Imsak	: 04:49 WIB	Ashar	: 15:59 WIB
Subuh	: 04:59 WIB	Maghrib	: 18:42 WIB
Zuhur	: 12:33 WIB	Isya	: 19:57 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya



Hidayah

Ojol Menuntut Keadilan

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Aksi ratusan pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara bukanlah sekadar demonstrasi tentang tarif. Di balik tuntutan itu tersimpan persoalan yang lebih mendasar, yakni keadilan ekonomi bagi jutaan pekerja sektor digital yang selama ini menopang mobilitas masyarakat, tetapi belum memperoleh perlindungan yang memadai. Ketika mereka turun ke jalan, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah sejauh mana negara hadir



■ Bersambung ke Hal 11

Ratusan Ojol Demo Kantor Gubernur Sumut

Desak Kepastian Tarif



Medan, MIMBAR – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7). Mereka mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait penetapan tarif dan kebijakan yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara massa dengan petugas keamanan. Mereka kecewa karena Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, tidak hadir untuk menemui mereka secara langsung. Perwakilan massa, Agam Zubir Siringo Ringo, mengatakan, para pengemudi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Namun,

■ Bersambung ke Hal 11

Pemerintah Sepakati Percepatan Pemulihan Infrastruktur di Bener Meriah

Aceh, MIMBAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemerintah bersama masyarakat telah menyepakati langkah percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kesepakatan tersebut diharapkan mempercepat pemulihan konektivitas bagi warga.

Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Selasa

(7/7). Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, serta tokoh masyarakat.

Tito mengatakan seluruh pihak telah menden-garkan aspirasi masyarakat sebelum menentukan langkah penanganan yang menjadi prioritas. Menurutnya, hasil pembahasan telah menghasilkan kesepakatan mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Kami sudah berembuk mendengarkan aspirasi dan intinya sudah ada kesepakatan," ujarnya dalam

■ Bersambung ke Hal 11

Menko Yusril: Perpres 111 Dasar Pemerintah Tangkal Penyebaran LGBTQ

Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 menjadi dasar pemerintah dalam menangkal penyebaran lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer (LGBTQ) sebagai bagian dari upaya



■ Bersambung ke Hal 11

Standar Gizi dan Standar Kenyang

Oleh: Masrin

Sebelum liburan sekolah lalu, saya sering bertanya kepada anak-anak tentang menu MBG mereka apa saja. Mereka menjawab kadang daging ayam, kadang telur, kadang ikan. Kalau daging sapi atau lembu, kata mereka baru sekali mereka rasakan pada saat awal-awal sekali MBG masuk ke sekolahnya pun dengan ukuran yang sangat kecil.

Selain lauk itu, mereka juga sebut hampir setiap hari selalu ada buah, penomat dua buah salak ukuran kecil. Kadang juga mendapatkan sekotak kecil susu cair.

■ Bersambung ke Hal 11



KORAN

MIMBAR UMUM

HARGA BARU

BERLANGGANAN KORAN

1 BULAN	= Rp. 20.000
12 BULAN	= Rp. 120.000

TERSEDIA DI

myedisi

reader

BISA DOWNLOAD APLIKASI DI

Google Play

App Store



■ Kecewa berat ya!?

■ Hehehe ...

Ratusan Ojol Demo Kantor Gubernur Sumut

Dari Halaman 1

menurutnya, hingga kini kebijakan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan para pengemudi. “Kami apresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dengan akan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026 demi meningkatkan penghasilan ojol. Namun setelah itu kami rasakan semua tidak bisa meningkatkan penghasilan para ojol. Bahkan kami tidak tahu apa hasilnya hingga hari ini,” ujamnya kepada wartawan. Selain itu, massa juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai penetapan tarif yang dinilai menjadi persoalan utama bagi para pengemudi.

Gubsu Bobby akan Bangun SMK Unggulan

Dari Halaman 1

Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (7/7/2026). "Kami sedang membangun sekolah unggulan di Samosir. Ini akan menjadi SMK Pariwisata," ujar Bobby dalam sambutannya. Menurut Bobby, sekolah tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mental para siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. "Skemanya adalah boarding dan semua biaya ditanggung pemerintah, bukan hanya materi pembelajaran, tetapi juga kesiapan mental siswa," ungkap Gubernur, dengan nada optimistis. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyediaan lahan pembangunan sekolah. Menurutnya, tahapan perencanaan telah berjalan dengan baik sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. "Tanahnya sudah kami siapkan, untuk tinggal

Pengungsi Papua Ditaksir Capai 122 Ribu Orang

Dari Halaman 1

diverifikasi bersama kementerian/lembaga terkait. Ia menjelaskan KemenHAM dan kementerian/terkait dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas soal pengungsi itu. "Ada banyak pengungsi di sana, dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan, melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar, yang jumlahnya besar. Jadi kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pen-

Pengeledahan, Penangkapan dan Penahanan

Dari Halaman 1

SEL di PN Jakarta Selatan, Selasa (7/7). Hakim menyatakan pengeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya berdasarkan surat perintah pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor: SP.Dah/373/VI/RES.1.24/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Meskipun pengeledahan tersebut memperoleh izin dari ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, tetapi hakim mempertimbangkan aspek formil lain yang juga penting yakni alasan pengeledahan, yang ternyata bertentangan antara yang tertera dalam permintaan izin dengan yang senyatanya dilakukan. Hakim mengatakan ketua PN Tangerang

Pemerintah Sepakati Percepatan Pemulihan

Dari Halaman 1

keterangan tertulis, Selasa (7/7). Pemerintah juga mengapresiasi inisiatif masyarakat yang bergotong royong memperbaiki akses jalan secara swadaya. Namun, hasil pembahasan menunjukkan Jembatan Enang-Enang masih memerlukan penguatan agar aman digunakan, terutama oleh kendaraan bertonase besar. Maka dari itu, pemerintah memutuskan mempertahankan fungsi jembatan tersebut den-

Standar Gizi dan Standar Kenyang

Dari Halaman 1

gkan pada hari tertentu mereka hanya mendapatkan makanan ringan, susu kotak, biskuit, dan buah salak kecil. Saya mendengarkan semuanya. Lalu tanpa sadar saya mulai membandingkan dengan isi piring di rumah. Bukan karena makanan di rumah selalu lebih mewah. Sama sekali bukan. Tetapi karena di rumah, istri saya tidak pernah menghitung kalori. Tidak pernah menghitung protein. Tidak pernah membaca tabel kebutuhan gizi anak. Ia hanya memakai satu ukuran yang sangat sederhana. "Anak jangan sampai lapar." Mungkin hampir semua ibu melakukan hal yang sama. Kalau anak masih minta tambah nasi, ditambah. Kalau lauknya habis, digoreng lagi telur. Kalau sayurnya tidak disentuh, biasanya mulai membujuk. Ukuran seorang ibu memang sederhana. Yang penting anak suka dan kenyang. Tetapi ternyata pemerintah memakai ukuran yang berbeda. Bukan lagi sekadar kenyang. Melainkan bergizi. Di sinilah saya mulai berpikir. Apakah kenyang selalu berarti bergizi? Atau justru bergizi belum tentu membuat anak merasa kenyang?

“Ketetapan tarif yang hari ini belum ada. Jadi hari ini sangat kami sayangkan Pak Gubernur hingga Ketua DPRD tidak bisa hadir hari ini,” kata Agam. Menurutnya, persoalan kesejahteraan pengemudi ojek online telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas. “Ini polemik yang hingga bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Kami hanya meminta keseimbangan dengan keringat kami di jalan,” tegasnya. Di tengah aksi, massa juga mengamankan seorang peserta yang diduga melakukan tindakan provokatif. “Satu orang kami amankan, bang, diduga provokator,” ujar Agam.

kami membangun. Jadi DED-nya sudah kami buat," jelasnya. Selain pembangunan sektor pendidikan, Bobby juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan kebudayaan di Sumut agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya perlu dikembangkan melalui pendekatan industri kreatif sehingga tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi. "Kita bukan zamannya lagi hanya melestarikan secara statis, tapi bagaimana melestarikan melalui industri," tegasnya di hadapan para tokoh PSBI. Pada kesempatan itu, Bobby juga mengusulkan integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Sumut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penyediaan air bersih di berbagai daerah. Sementara itu, Ketua PSBI Effendi Simbolon menyampaikan tiga aspirasi utama yang dinilai menjadi persoalan mendasar di tengah masyarakat.

gungsi," kata Mugiyanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (7/7). Mugiyanto mengatakan, para pengungsi tersebut merupakan pengungsi internal atau internally displaced persons (IDP). IDP adalah sebutan untuk orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka akibat konflik, bencana, atau kekerasan, tetapi mereka masih berada di dalam batas wilayah negara mereka sendiri. Mugiyanto mengatakan para pengungsi di Papua meninggalkan tempat tinggal karena tidak merasa aman. "Tidak ada rasa aman di tempat tinggal mereka sehingga mereka mengungsi. Jadi ada banyak dan itu menjadi atensi kita. Karena

memberikan izin kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan pengeledahan karena rumah atau tempat tertutup sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut diduga oleh Polda Metro Jaya sebagai tempat persembunyian barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka. Namun, lanjut hakim, dalam pelaksanaannya, sebagaimana didalilkan oleh Polda Metro Jaya, pengeledahan yang dilakukan adalah untuk melakukan penangkapan guna keperluan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum karena berkas perkara telah lengkap. "(Pengeledahan) tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti," ucap hakim.

gan melakukan penguatan struktur. Langkah itu mempertimbangkan nilai sejarah yang dimiliki Jembatan Enang-Enang sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi. "Khusus untuk Jembatan Enang-Enang ini, ini memiliki nilai histori panjang, sehingga tetap akan difungsikan, tapi nanti Balai PU (Pekerjaan Umum) akan memperkuat [struktur-nya]," imbuh Tito. Selama proses penguatan jembatan berlangsung, pemerintah akan menyiapkan jalur

Pertanyaan itu mungkin terdengar sepele. Tetapi sesungguhnya di situlah inti dari Program Makan Bergizi Gratis. Karena tujuan program ini bukan sekadar mengisi perut anak-anak selama berada di sekolah. Pemerintah ingin mereka tumbuh lebih sehat. Lebih kuat. Lebih cerdas. Itu sebabnya kata yang dipilih adalah "bergizi", bukan "makan gratis". Masalahnya, gizi bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Kalau nasi kurang, anak langsung tahu. Kalau lauk sedikit, mereka juga tahu. Tetapi apakah protein yang mereka makan hari itu sudah cukup? Apakah kebutuhan zat besinya terpenuhi? Apakah vitaminnya sesuai? Anak-anak tentu tidak pernah menghitung sampai sejauh itu. Orang tua pun sebagian besar tidak. Karena itulah pemerintah hadir membawa standar. Dan ketika negara sudah menetapkan sebuah standar, masyarakat tentu berharap standar itu benar-benar bisa dipenuhi. Bukan hanya di atas kertas. Tetapi juga di atas piring. Saya membayangkan pekerjaan itu pasti tidak mudah. Indonesia bukan satu kota. Bukan pula satu kabupaten. Anak-anak yang menerima MBG jumlahnya jutaan. Mereka tinggal di daerah yang berbeda. Harga bahan makanan berbeda. Keterse-diaan ikan berbeda. Sayuran berbeda. Kebiasaan makan juga berbeda.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap ketidakpastian kebijakan yang dinilai masih membebani pengemudi ojek online, terutama terkait tarif, perlindungan kerja, dan kesejahteraan mitra pengemudi. Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menemui perwakilan massa dan menerima aspirasi yang disampaikan. “Sebagai pemerintah daerah kami akan menyampaikan apa yang menjadi aksi tuntutan dari kawan-kawan ojol agar aspirasi bisa berjalan dengan baik,” kata Sulaiman. Sulaiman menjelaskan Gubernur Sumatera Utara tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas di luar kota.(bes/js)

Pertama, terkait infrastruktur, ia menyoroti masih terbatasnya ketersediaan air bersih dan air irigasi di Kabupaten Samosir. “Satu-satunya kabupaten yang di tengah air, tapi kekurangan air. Baik air bersih maupun air irigasi,” ujar Effendi. Kedua, mengenai operasional Aquafarm di kawasan Danau Toba. Menurutnya, PSBI tidak menginginkan perusahaan tersebut ditutup, tetapi meminta adanya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. "Kami tidak ingin menutup Aqua Farm, tapi kami minta dengan Aquafarm agar melaksanakan water and wastewater treatment," tegasnya. Ketiga, PSBI menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Batak sebagai warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat. "Kami hidup dan dibesarkan sampai sekarang ini tidak terlepas dari DNA orang Batak itu adalah budaya. Jadi mohon, karena di dalam budaya itulah ada seni, seninya bermacam-macam," katanya.(A-05)

kan mereka juga punya hak atas apa namanya shelter ya, ketika mengungsi kan ya tempatnya harus dipastikan ya aman, kebutuhan-kebutuhan dasar ya gitu bisa dipenuhi," katanya. Ia menjelaskan pemerintah belum dapat meminta mereka kembali ke daerah asal sebelum situasi dinilai aman. Mugiyanto menyebut rapat bersama kementerian/lembaga terkait penting dilakukan untuk menyelesaikan persoalan soal pengungsi itu. "Tetapi meminta mereka segera kembali juga belum bisa, karena belum ada rasa aman. Jadi situasinya seperti itu teman-teman, karena itulah pertemuan yang akan kami selenggarakan untuk menyelesaikan persoalan pengungsi itu penting," katanya.(cnni/js)

Hakim menambahkan pengeledahan harus berpedoman pada aturan berlaku yakni adanya dua orang saksi, serta harus diawasi oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hakim mafhum pelaksanaan penyidikan penuh tantangan dan rintangan. Namun, hal itu bersifat kasuistik. Tidak setiap perkara mempunyai kendala yang sama seperti pelaku tindak pidana kabur hingga menghilangkan barang bukti. Berdasarkan fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan Polda Metro Jaya, Roy terbukti bersikap kooperatif. "Sehingga secara materiel, menurut hakim tidak ada urgensinya melakukan pengeledahan dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap Pemohon," ucap hakim. (cnni/js)

alternatif melalui Werlah. Jalan tersebut akan diperbaiki lebih dahulu, mulai dari pelebaran hingga peningkatan kualitas permukaan jalan agar dapat digunakan sebagai akses sementara. Di samping pemulihan akses yang ada, pemerintah dan masyarakat juga menyepakati pembangunan jembatan permanen. Jembatan baru itu direncanakan menjadi salah satu infrastruktur utama yang mendukung mobilitas sekaligus menjadi penanda kawasan Gayo.(cnni/js)

Menyusun satu standar untuk seluruh Indonesia tentu bukan pekerjaan sederhana. Tetapi justru karena sulit, pengawasannya harus jauh lebih serius. Sebab anak-anak tidak sedang mengonsumsi angka. Mereka sedang memakan makanan yang akan menjadi bagian dari pertumbuhan tubuh mereka. Kalau gizinya kurang hari ini, mungkin tidak langsung terlihat besok. Kalau proteinnya tidak cukup minggu ini, mungkin tidak langsung terasa bulan depan. Tetapi pertumbuhan anak berlangsung setiap hari. Tubuh mereka tidak pernah menunggu rapat evaluasi. Ia terus bekerja. Terus membangun tulang. Terus membentuk otot. Terus menyusun sel-sel baru. Karena itu, menurut saya, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada jumlah ompreng yang berhasil dibagikan. Bukan pula hanya pada berapa juta anak yang menerima makanan setiap hari. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah makanan itu benar-benar memenuhi tujuan ketika program ini dilahirkan. Karena pada akhirnya, yang ingin kita bangun bukan sekadar anak-anak yang pulang sekolah dengan perut terisi. Kita ingin mereka pulang membawa bekal yang jauh lebih penting. Bekal untuk tumbuh. Dan bekal itu tidak selalu bisa diukur dari rasa kenyang.

Menko Yusril:

Dari Halaman 1

mencegah degradasi moral. Yusril mengatakan pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dinilai dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pemerintah berkewajiban melindungi rakyat, segenap bangsa dari ancaman degradasi moral yang pada akhirnya akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita," katanya usai menyampaikan Orasi Kebangsaan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (7/7) seperti dikutip dari Antara. Yusril mengatakan pemerintah telah mengategorikan penyebaran LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmilitar melalui Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tersebut. Menurut dia, peraturan tersebut harus dihormati seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman nonmilitar.(anti/js)

KPK Sita

Dari Halaman 1

nan. Selain itu, penyidik menggeledah rumah pribadi maupun dinas para tersangka yakni Bupati Kuansing periode 2025-2030 Suhardiman Amby; Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain; dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles. Selain kantor dan rumah tersangka, penggeledahan juga dilakukan di beberapa rumah lainnya yang terkait dengan perkara dimaksud. Satu di antaranya adalah rumah Kepala Dinas Perkebunan. Sementara itu, penggeledahan di Pekanbaru menyasar salah satu kantor ekspedisi. "Dalam rangkaian penggeledahan, tim menemukan dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang memperkuat pembuktian dalam konstruksi perkara dimaksud," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7). (cnni/js)



Ojol Menuntut Keadilan

Dari Halaman 1

untuk melindungi pekerja di tengah pesatnya perkembangan ekonomi berbasis aplikasi. Para pengemudi mengaku mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Namun, apresiasi itu berubah menjadi kekecewaan ketika regulasi tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan mereka. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sebuah kebijakan tidak cukup hanya berhenti pada penerbitan aturan. Kebijakan baru memiliki makna apabila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Persoalan tarif menjadi inti tuntutan para pengemudi. Selama ini mereka berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mereka harus memenuhi target untuk memperoleh penghasilan yang layak, sementara di sisi lain mereka menghadapi potongan aplikasi, persaingan yang semakin ketat, kenaikan harga kebutuhan hidup, serta biaya operasional kendaraan yang terus meningkat. Akibatnya, banyak pengemudi harus bekerja lebih lama hanya untuk memperoleh pendapatan yang relatif sama atau bahkan menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Di sinilah pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator yang mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan aplikasi, konsumen, dan mitra pengemudi. Tarif yang terlalu rendah memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi dapat merugikan pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi juga berpotensi mengurangi jumlah pelanggan. Karena itu, kebijakan tarif harus disusun berdasarkan kajian yang transparan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan biaya hidup yang terus berubah.

Kekecewaan massa karena Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPRD tidak hadir menemui mereka juga patut menjadi perhatian. Memang, pemerintah menjelaskan bahwa gubernur sedang menjalankan tugas di luar daerah. Namun, dalam perspektif komunikasi publik, kehadiran seorang pemimpin pada saat masyarakat menyampaikan aspirasi memiliki nilai simbolik yang sangat besar. Kehadiran tersebut menunjukkan empati, kesediaan mendengar, dan penghormatan terhadap warga. Ketika ruang dialog tidak terbuka secara langsung, rasa kecewa masyarakat menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Aksi yang berlangsung relatif tertib, meskipun sempat diwarnai ketegangan, patut diapresiasi. Demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Yang penting adalah seluruh pihak mampu menahan diri agar aspirasi tidak berubah menjadi konflik yang justru merugikan semua pihak. Dugaan adanya provokator juga hendaknya disikapi secara hati-hati dan berdasarkan proses hukum yang adil agar tidak memunculkan kesalahpahaman baru. Fenomena ini juga mengingatkan bahwa status kemitraan yang selama ini melekat pada pengemudi ojol masih menyisakan banyak persoalan. Mereka disebut sebagai mitra, tetapi dalam praktiknya sangat bergantung pada kebijakan perusahaan aplikasi. Ketika algoritma berubah, bonus dikurangi, atau tarif disesuaikan, ruang tawar mereka relatif terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang tidak hanya mengatur tarif, tetapi juga memberikan kepastian mengenai perlindungan sosial, jaminan kerja, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hak-hak dasar para mitra. Aksi pengemudi ojol di Sumatera Utara hendaknya tidak dipandang sebagai gangguan terhadap ketertiban umum, melainkan sebagai pengingat bahwa pembangunan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan keadilan sosial. Negara, pemerintah daerah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi perlu duduk bersama mencari solusi yang berkelanjutan. Jangan sampai mereka yang setiap hari mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan justru terus berjalan tanpa kepastian mengenai masa depan mereka sendiri. Keadilan bagi pengemudi ojol bukan sekadar soal tarif, melainkan tentang penghargaan terhadap kerja keras manusia yang telah menjadi bagian penting dari denyut kehidupan ekonomi Indonesia.